

## **KONSTRUKSI IDEOLOGI PENDIDIKAN PESANTREN KONTEMPORER: ANALISIS STRUKTURALIS**

Dedi Eko Riyadi Hs<sup>1</sup>, Maftuhah<sup>2</sup>, Zunaidah<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Islam merupakan fondasi utama bagi ideologi pesantren. Penanaman nilai-nilai Islam kepada santri menjadi aspek penting karena berfungsi sebagai modal dasar ketika mereka berhadapan dengan realitas sosial di masyarakat. Tulisan ini mendiskusikan ideologi pesantren dengan menggunakan pendekatan strukturalisme, yang bertujuan untuk mengkaji strategi pelaksanaan ideologi pendidikan dalam membentuk perilaku dan cara pandang santri. Pendekatan ini menempatkan pesantren sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat struktur, peran, dan relasi sosial yang saling menopang. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran ideologi pendidikan Islam di pesantren sangat ditentukan oleh kepiawaian kiai sebagai figur sentral yang memiliki otoritas keilmuan dan moral di tengah masyarakat. Kemapanan ilmu dan keteladanan kiai memperkuat legitimasi ideologi yang diajarkan. Selain itu, jaringan alumni dan relasi pesantren dengan masyarakat berperan penting dalam memperluas penerapan nilai-nilai ideologis tersebut. Dominasi peran kiai sebagai pemimpin menjadikan proses transformasi ideologi terinternalisasi dalam seluruh aktivitas keseharian santri.”

**Keywords:** *Ideologi pendidikan pesantren, Analisis Strukturalis*

Published Online : 20 Februari 2026

**How To Cite** : Eko, D., Maftuhah, & Zunaidah. (2026). KONSTRUKSI IDEOLOGI PENDIDIKAN PESANTREN KONTEMPORER: ANALISIS STRUKTURALIS. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 100-115. <https://doi.org/10.51700/attadbir.v6i1.1664>

---

Dedi Eko Riyadi Hs<sup>1</sup>, Maftuhah<sup>2</sup>, Zunaidah<sup>3</sup>  
Email Respondensi : [ekoriyadi.dedi@gmail.com](mailto:ekoriyadi.dedi@gmail.com)

<sup>1</sup> STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

<sup>2</sup> STIT Muhammadiyah Paciran

<sup>3</sup> STAI Muhammadiyah Paciran

## Pendahuluan

Fenomena munculnya gagasan *pesantren terpadu* dalam dunia pendidikan pesantren, sebagaimana hadirnya konsep *sekolah unggul* dalam pendidikan formal, pada dasarnya berakar pada pertarungan ideologi dan perspektif pendidikan. Dinamika tersebut secara tidak langsung mendorong pesantren mengalami transisi dari model pendidikan tradisional yang kurang responsif terhadap perubahan sosial menuju pendidikan yang berorientasi pada pembangunan. Dalam model ini, pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian output institusional, sering kali tanpa kajian kritis terhadap ideologi yang melandasi arah pembangunan tersebut (Bahri, 2019).

Fenomena munculnya gagasan *pesantren terpadu* dalam dunia pendidikan pesantren, sebagaimana hadirnya konsep *sekolah unggul* dalam pendidikan formal, pada dasarnya berakar pada pertarungan ideologi dan perspektif pendidikan. Dinamika tersebut secara tidak langsung mendorong pesantren mengalami transisi dari model pendidikan tradisional yang kurang responsif terhadap perubahan sosial menuju pendidikan yang berorientasi pada pembangunan. Dalam model ini, pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian output institusional, sering kali tanpa kajian kritis terhadap ideologi yang melandasi arah pembangunan tersebut.

Ajaran Islam menjadi asas ideologi pendidikan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Hal ini tercermin dari keterkaitan erat antara aktivitas belajar dan motivasi religius dalam tradisi pesantren. Secara historis, menuntut ilmu dipandang sebagai ibadah yang bernilai tinggi karena menjanjikan kemuliaan di dunia dan derajat mulia di sisi Allah SWT di akhirat. Keutamaan orang berilmu bahkan diposisikan lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah semata. Wahyu pertama "Iqra'" menegaskan pentingnya aktivitas intelektual seperti membaca dan menulis sebagai fondasi pencerahan. Seruan ini menjadi basis transformasi peradaban Islam menuju kemajuan moral dan intelektual.

Seruan *Iqra'* sebagai wahyu pertama menegaskan pentingnya aktivitas membaca dan menulis sebagai fondasi utama dalam sejarah peradaban manusia. Dalam perspektif Islam, konsep *al-ta'allum thûla al-hayâh* (belajar sepanjang hayat) memiliki nilai sakral karena menuntut ilmu dipahami bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan hidup, melainkan sebagai kewajiban ilahiah. Sebagaimana dikutip Mas'ud dari *Ihya' 'Ulûm al-Dîn* karya al-Ghazali, tinta para pelajar disetarakan dengan darah para syuhada. Oleh karena itu, guru dan murid menempati posisi strategis sebagai agen utama pengembangan ilmu. Al-Qur'an dan hadis menjadi kurikulum inti yang secara konsisten mewariskan tradisi keilmuan Islam lintas generasi (Ali, 2020).

Motivasi religius yang mengakar kuat dalam kehidupan umat Islam telah berkembang menjadi ideologi yang menyatu dalam perjalanan sejarah Muslim. Ideologi tersebut ditransformasikan secara sistematis kepada generasi berikutnya melalui lembaga pendidikan, terutama pesantren. Pesantren berperan sebagai

institusi pendidikan Islam yang konsisten menjaga dan mereproduksi nilai-nilai ideologi pendidikan Islam. Integralitas nilai pendidikan di pesantren merupakan hasil fermentasi budaya masyarakat yang sarat dengan ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari santri, khususnya dalam pembentukan akhlak. Sebagaimana dikemukakan Karel A. Steenbrink, proses internalisasi nilai di pesantren berlangsung melalui keteladanan, tradisi keilmuan, dan pola kehidupan kolektif yang berkelanjutan.

'Untuk meresapi jiwa keislaman, pesantren tidak hanya dihormati sebagai tempat belajar, tetapi lebih ditekankan sebagai tempat tinggal yang seluruhnya dipenuhi dan diresapi dengan nilai-nilai agama. Tidak ada tempat lain di mana salat didirikan dengan taat seperti di sana. Pada siang hari, di mana-mana orang dapat mendengar para santri membaca al-Qur'an dengan lagu yang indah, memperbaiki bacaan dengan tajwid yang benar, atau hanya untuk mengharap pahala dari membaca al-Qur'an. Pada malam hari juga dapat dijumpai suasana orang membaca al-Qur'an, melagukan kalam Ilahi dan mendirikan salat di tengah keheningan malam (Jaya, 2023).

Bangunan nilai yang melekat pada lembaga pendidikan Islam tradisional tidak dapat dilepaskan dari tujuan historis pendiriannya. Binti Maunah mengemukakan bahwa keberadaan pesantren setidaknya didorong oleh dua alasan utama. Pertama, pesantren hadir sebagai respons terhadap kondisi sosial masyarakat yang mengalami kemerosotan moral, dengan menawarkan transformasi nilai melalui prinsip *amar ma'rûf nahy munkar*. Kedua, pesantren berfungsi sebagai sarana penyebaran misi universal ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara yang memiliki karakter plural, baik dari segi kepercayaan, budaya, maupun struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian, pesantren memainkan peran strategis dalam pembentukan nilai keislaman dan sosial secara berkelanjutan.

Sistem pendidikan Islam tradisional pesantren dibangun atas elemen utama yang saling terintegrasi, yaitu kiai, santri, masjid, asrama, dan pengajian kitab kuning. Keterpaduan antarunsur tersebut membentuk karakter pendidikan yang khas dan membedakannya dari sistem pendidikan lain. Secara antropologis, pesantren lahir dari praktik kebiasaan keagamaan masyarakat yang berulang dan berkelanjutan, kemudian dilembagakan sebagai norma sosial yang ditaati bersama. Dalam konteks sosial, pesantren berfungsi sebagai institusi budaya yang bersifat relatif permanen, berorientasi pada pembentukan keteraturan, ketertiban, dan stabilitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kiai merupakan figur sentral dalam pesantren dan komunitas masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan kiai tidak hanya memiliki pemahaman keislaman yang mendalam sehingga menjadi rujukan keilmuan bagi santri, tetapi juga berperan sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan. Kedalaman ilmu dan kesalehan sosial kiai menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang memiliki basis sosial kuat karena menyatu dengan kehidupan masyarakat. Pada masa ketika lembaga sosial lain belum berfungsi optimal, pesantren termasuk

Dayah di Aceh dan Surau di Sumatera Barat menjadi pusat berbagai aktivitas sosial, mulai dari pendidikan agama, pengobatan tradisional, hingga konsolidasi perlawanan terhadap penjajah.

Pesantren sebagai sebuah subkultur pendidikan Islam sejak awal kemunculannya telah menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama dalam seluruh praktik pendidikannya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Amin Haedari menegaskan bahwa dengan modal nilai yang kuat, pesantren memiliki keterkaitan yang erat dengan realitas sosial masyarakat sekitarnya. Keterhubungan ini menjadikan pesantren tidak sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga berperan strategis sebagai penopang penting dalam pembangunan dan penguatan sistem pendidikan Islam di Nusantara secara berkelanjutan. (Remaja & Togel, 2018)

Berikut pernyataan Abdurrahman Wahid dalam satu tulisannya:

Ada tiga elemen dasar yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur. Pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara. Kedua, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. Ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.

Haedari, dengan mengutip Abdurrahman Wahid, menjelaskan bahwa pada fase awal perkembangannya, pesantren tidak semata-mata memfokuskan pendidikan pada ilmu-ilmu keislaman dan pengkaderan ulama. Pesantren juga menyelenggarakan pendidikan umum yang memadukan materi keagamaan dan nonkeagamaan. Dalam konteks tersebut, pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat luas, khususnya rakyat kecil yang tidak memiliki akses terhadap lembaga pendidikan kolonial yang pada masa itu hanya diperuntukkan bagi kalangan elite.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara sistematis dipersiapkan untuk menyelenggarakan pendidikan agama sejak tingkat dasar hingga jenjang yang lebih lanjut. Oleh karena itu, nilai-nilai ajaran Islam tercermin secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari para santri, khususnya nilai-nilai moral (akhlak). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pesantren membentuk jati diri peserta didik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual serta memiliki kepekaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Komunitas pesantren merupakan bagian integral dari ideologi Sunni atau *Ahlussunnah waljamâ'ah*, yang tercermin dalam tiga aspek utama: tauhid (teologi), Syafi'isme dalam pemikiran fikih, dan Ghazalisme dalam etika tasawuf. Orientasi Sunnisme ditandai oleh penekanan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber utama penyelesaian persoalan ideologis dan pedoman hidup. Hal ini berbeda secara fundamental dengan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasionalitas dan pengaruh filsafat. Kaum Sunni merujuk pada otoritas salaf al-shâlih dan ulama klasik.

Ideologi pendidikan pesantren berakar kuat pada ajaran Islam dan terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Pesantren menjadi ruang pembentukan keyakinan dan orientasi keilmuan santri melalui praktik pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis sebagai kurikulum utama. Nilai-nilai tersebut menginspirasi alumni untuk bersikap bijak dalam merespons tantangan global. Meskipun pascakemerdekaan pesantren menghadapi arus modernisasi yang mengubah format dan metode pendidikan, perubahan tersebut tidak menggeser visi, misi, dan orientasi ideologis pesantren yang tetap terjaga.

Kemajuan ilmu pengetahuan keagamaan merupakan respons atas tuntutan religius dan kultural yang selaras dengan kondisi geografis dan geobudaya Indonesia. Tantangan utamanya terletak pada strategi penerapan ideologi pendidikan pesantren kepada santri agar nilai-nilai filosofis yang diajarkan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga terinternalisasi dan tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.

## **Metode**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif strukturalisme untuk menganalisis konstruksi ideologi pendidikan pesantren kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mampu menelaah pesantren sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks, di mana terdapat struktur, peran, dan relasi yang saling memengaruhi dalam proses internalisasi nilai-nilai Islam kepada santri. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi mekanisme penyebaran ideologi pendidikan melalui peran kiai sebagai figur sentral, serta bagaimana legitimasi otoritas keilmuan dan moral kiai mempengaruhi penerimaan dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari santri. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan kiai dan santri, serta observasi partisipatif terhadap aktivitas pesantren (Creswell, 2009).

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif yang menekankan pemahaman konteks sosial dan relasi antaraktor di pesantren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri strategi pelaksanaan ideologi pendidikan, jaringan alumni, dan interaksi pesantren dengan masyarakat yang memperkuat penyebaran nilai-nilai ideologis. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data dan pengecekan kredibilitas informasi dari berbagai informan. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan fakta, tetapi juga pada pemahaman struktur sosial, legitimasi otoritas kiai, serta mekanisme transformasi ideologi yang berlangsung secara kontinu dan menyeluruh di pesantren kontemporer (Huberman, 2014).

## **Hasil penelitian**

### **Kajian Ideologi melalui Lensa Strukturalisme**

Ideologi pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi sosial dan fungsi individual. Secara sosial, ideologi berperan mengikat individu dalam suatu

tatanan bersama, sedangkan secara individual ideologi membentuk orientasi dan peran kepribadian yang dianggap matang. Kedua fungsi tersebut berkontribusi dalam proses legitimasi kekuasaan. Dalam perkembangan masyarakat modern, ideologi kerap digunakan sebagai instrumen pembenaran kekuasaan oleh elite melalui klaim rasional dan moral tertentu. Oleh karena itu, kajian ilmu sosial perlu menekankan aspek solidaritas dan identitas untuk merespons problem ideologis (Yavuz, 2024).

Sebelum melangkah lebih jauh, pendefinisian ideologi menjadi hal yang penting. Ideologi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai seperangkat gagasan yang berkelindan dengan aktivitas individu dan praktik kehidupan sehari-hari. Ia beroperasi dalam kerangka makna yang lebih luas dan termanifestasi dalam pola perilaku sosial yang dianggap sah, terhormat, dan bernilai oleh masyarakat. Ideologi merupakan istilah umum bagi gagasan-gagasan yang memiliki potensi untuk mengarahkan tindakan dalam konteks tertentu. Berbeda dengan filsafat yang bersifat reflektif-abstrak, ideologi bersifat lebih ringkas, operasional, dan kontekstual. Melalui daya kreatifnya termasuk gagasan keagamaan dan peran aktor inovatif ideologi mampu memperluas peran dan agensi individu dalam kehidupan sosial (Telegraph, 2009).

Kemunculan istilah ideologi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan intelektual yang menyertai Revolusi Industri. Perubahan tersebut ditandai oleh meluasnya gagasan demokrasi, politik gerakan massa, serta keyakinan bahwa manusia mampu membentuk dan merekonstruksi dunianya sendiri. Di sisi lain, ideologi juga lahir sebagai respons atas meningkatnya pluralitas masyarakat dan kompetisi antar kelompok sosial dengan kepentingan yang berbeda (Zubaedi, 2017). Menurut Vigo sebagaimana dikutip oleh Achmadi, ideologi memiliki fungsi positif, yakni memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap relasi sosial, memperkuat solidaritas kelompok, serta memotivasi individu dalam menentukan dan menjalankan pola tindakan tertentu.

Menurut kaum positivistik, ideologi mencakup penilaian etis, norma, serta teori metafisik dan keagamaan yang dianggap tidak ilmiah karena bersifat subjektif dan tidak rasional. Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip Achmadi, menegaskan bahwa ideologi bersifat subjektif, normatif, dan eksklusif, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat objektif, faktual, dan inklusif (Achmadi, 2010).

Menurut Terry Eagleton sebagaimana dikutip Bagus Takwin, penyebaran ideologi bekerja melalui tiga strategi utama, yakni rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Rasionalisasi dilakukan dengan menyajikan argumen yang tampak logis dan masuk akal. Universalisasi berupaya menampilkan gagasan seolah-olah berlaku umum dan dibutuhkan semua pihak. Sementara itu, naturalisasi menjadikan ideologi tampak alamiah, wajar, dan diterima tanpa dipertanyakan (Eagleton, 2020).

Menurut Henry Giroux dan Stanley Aronowitz sebagaimana dikutip oleh William F. O'Neil, ideologi pendidikan dapat dipetakan ke dalam tiga paradigma

utama, yaitu konservatif, liberal, dan kritis. Paradigma konservatif memandang ketidaksejajaran sosial sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan historis, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Dalam pandangan ini, masyarakat dianggap tidak memiliki kapasitas untuk merencanakan maupun mengubah struktur sosial yang ada, sehingga pendidikan berfungsi mempertahankan tatanan yang telah mapan. Paradigma liberal beranggapan bahwa pendidikan bersifat netral dan terpisah dari persoalan politik serta ekonomi. Meskipun demikian, kelompok liberal tetap berupaya menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan eksternal melalui reformasi terbatas yang bersifat teknis dan administratif, seperti perbaikan fasilitas, modernisasi sarana belajar, dan penyesuaian rasio guru dan siswa. Adapun paradigma kritis memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik dan ideologis. Paradigma ini menekankan perlunya transformasi struktural yang mendasar dalam sistem politik dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan (Soeharto, 2010).

Menurut Henry Giroux, paradigma ideologi pendidikan dalam perspektif kritis menempatkan pendidikan sebagai ruang refleksi kritis terhadap *dominant ideology* guna mendorong transformasi sosial. Ideologi dipahami sebagai produk pemikiran manusia yang berkembang seiring pluralitas masyarakat, demokratisasi politik, revolusi komunikasi, serta meningkatnya tingkat literasi secara signifikan (Antonius & Wattimena, 2018).

Peta ideologi pendidikan Giroux sejalan dengan analisis Paulo Freire tentang tingkatan kesadaran manusia, yakni kesadaran magis, naif, dan kritis. Kesadaran magis ditandai oleh ketidakmampuan memahami hubungan sebab-akibat antar faktor sosial. Kesadaran naif memandang persoalan masyarakat bersumber dari individu, seperti etika, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Adapun kesadaran kritis melihat bahwa akar persoalan sosial terletak pada sistem dan struktur yang membentuk ketimpangan dan ketidakadilan (Nuryatno, 1999).

Secara umum, ideologi berfungsi sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Kelompok yang berkuasa cenderung berupaya menjaga dominasinya melalui penyebaran makna yang mendukung kepentingannya. Kajian ideologi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara makna dan dominasi, di mana makna ideologis diinternalisasikan kepada kelompok tertentu. John B. Thompson, sebagaimana dikutip Bagus Takwin, menjelaskan lima modus kerja ideologi, yaitu legitimasi, disimulasi, unifikasi, fragmentasi, dan reifikasi. Kelima modus ini menjadi sarana simbolik yang berperan dalam melanggengkan dominasi sosial.

Strukturalisme pada mulanya berakar pada teori linguistik Ferdinand de Saussure yang menekankan pentingnya struktur bahasa dalam kajian linguistik. De Saussure membedakan bahasa ke dalam dua konsep utama, yakni *langue* dan *parole*. *Langue* dipahami sebagai sistem bahasa yang bersifat sosial, baku, dan memiliki struktur gramatikal yang ajeg, sedangkan *parole* merupakan bentuk penggunaan bahasa secara individual yang tampil dalam ujaran, dialek, dan gaya bahasa yang beragam. Dalam kerangka epistemologisnya, de Saussure

memberikan prioritas analisis pada *langue* sebagai sistem terstruktur, sementara *parole* diposisikan sebagai ekspresi individual yang bersifat aksidental. Pemisahan ini sekaligus menegaskan perbedaan antara aspek sosial dan aspek individual dalam bahasa (Rafiq, 2021).

Robert Scholes menegaskan bahwa analisis struktural berakar pada pemikiran Ferdinand de Saussure dalam *Cours de Linguistique Générale* (1915). Karya tersebut mendefinisikan bahasa sebagai sistem tanda dan membaginya ke dalam tiga level aktivitas linguistik, yaitu *language*, *langue*, dan *parole*, sebagai dasar memahami struktur dan fungsi bahasa.

In the Cours Saussure begins by defining language itself. His definition is unusual in that it distinguishes three levels of linguistic activity: language, langue, and parole. Language is the broadest aspect, for it includes the entire human potential for speech, both physical and mental...Langue is the language-system which each of us uses to generate discourse that is intelligible to other. Our individual utterances are what Saussure calls parole. Thus language is linguistic potential, langue is a language system, and parole is individual utterance (Fitriyah et al., 2022).

Strukturalisme merupakan aliran pemikiran filsafat yang berangkat dari asumsi bahwa setiap masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur dasar yang relatif sama dan bersifat stabil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pendekatan strukturalisme mensyaratkan pemahaman mendalam mengenai konsep "struktur". Ciri utama pendekatan ini terletak pada fokusnya terhadap deskripsi kondisi aktual suatu objek dengan menyingkap sifat-sifat intrinsik yang tidak terikat oleh dimensi waktu. Strukturalisme juga menekankan analisis hubungan antarunsur dalam suatu sistem secara hierarkis dan saling terkait. Secara sederhana, pendekatan ini dapat dianalogikan dengan cara memahami struktur bangunan (Daud, 2012).

Gagasan dasar Ferdinand de Saussure dalam kajian strukturalisme bahasa mencakup empat konsep utama. Pertama, pendekatan diakronis dan sinkronis. Penelitian diakronis menelaah bahasa berdasarkan perkembangan historisnya, sedangkan penelitian sinkronis mengkaji struktur bahasa pada satu kurun waktu tertentu. Kedua, konsep *langue* dan *parole*. *Langue* merujuk pada sistem bahasa yang bersifat kolektif, mengandung kaidah, dan menjadi konvensi sosial, sementara *parole* adalah penggunaan bahasa secara individual dalam praktik ujaran. Ketiga, hubungan sintagmatik dan paradigmatis. Hubungan sintagmatik berkaitan dengan susunan unsur bahasa secara berurutan dalam struktur, sedangkan paradigmatis bersifat asosiatif dan memungkinkan unsur saling menggantikan. Keempat, konsep penanda dan petanda, di mana tanda bahasa terdiri atas penanda sebagai citra bunyi dan petanda sebagai konsep makna yang saling terkait.

Strukturalisme Ferdinand de Saussure berpijak pada postulat bahwa makna suatu wacana tidak ditentukan oleh maksud pembicara, pendengar, maupun realitas yang dibicarakan, melainkan oleh struktur internal teks itu sendiri. Dalam

cakupan yang lebih luas, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menganalisis sastra, kebudayaan, dan ideologi. Pada tataran teori ideologi, pemahaman terhadap ideologi suatu masyarakat tidak bergantung pada pencetus atau penganutnya, tetapi pada struktur ideologis yang mengaturnya. Dengan demikian, manusia dipahami bukan sebagai pencipta struktur, melainkan sebagai produk dari struktur tersebut. Implikasinya, Strukturalisme linguistik cenderung menekankan aspek psikologis langue dibandingkan dimensi sosialnya (Wildan et al., 2019).

Budaya tidak dapat diproduksi dan dikembangkan secara tepat tanpa pemahaman yang kuat mengenai hakikat agensi manusia. Dalam konteks ini, Strukturalisme memberikan kontribusi penting melalui penggunaan teori “subjek” untuk menggantikan asumsi bahwa subjektivitas merupakan dasar pengalaman yang sepenuhnya otonom. Namun demikian, menurut Anthony Giddens, Strukturalisme cenderung mengabaikan dua elemen krusial, yakni kesadaran praktik dan kontekstualitas tindakan, yang justru penting untuk menjelaskan agensi manusia. Oleh karena itu, Strukturalisme lebih berfungsi sebagai metodologi dengan implikasi ideologis, sebagaimana ditegaskan Robert Scholes, yang melihatnya sebagai upaya menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam satu sistem kepercayaan baru. Berikut pernyataan Robert Scholes, yaitu, “Structuralism is at present only methodology with ideological implication, but it is a methodology which is seeking nothing less than the unification of all the sciences into a new system of belief.”

Pendekatan strukturalisme dalam kajian agama berakar pada kritik Émile Durkheim terhadap pendekatan intelektual yang cenderung menggeneralisasi realitas agama secara evolusioner, khususnya dengan melihat perkembangan agama dari animisme menuju monoteisme. Dalam *The Elementary Forms of Religious Life*, Durkheim berupaya memahami agama dari bentuk yang paling sederhana, sebagaimana dianut oleh suku Aborigin di Australia, hingga agama yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik seperti agama monoteistik. Ia menemukan bahwa unsur fundamental agama terletak pada perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tanpa harus selalu memaknai yang sakral sebagai sesuatu yang spiritual. Selain itu, Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu totalitas yang diikat oleh relasi sosial dan konsensus moral. Pandangan ini kemudian mengilhami berkembangnya pendekatan struktural dalam memahami agama sebagai fenomena sosial, termasuk dalam menganalisis lembaga pendidikan pesantren sebagai ruang institusional internalisasi ideologi keagamaan.

Menurut Lévi-Strauss, sebagaimana dikutip Bagus, berbagai aspek sosial dapat dipahami memiliki sifat yang serupa dengan bahasa, termasuk seni dan agama. Pandangan ini melahirkan implikasi metodologis penting dalam antropologi struktural, yakni bahwa setiap fenomena sosial harus dianalisis sebagai bagian dari suatu sistem dasar yang menyerupai terminologi dalam bahasa, seperti kata atau fonem. Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri,

melainkan saling berhubungan dalam satu struktur yang menyatukan makna. Dengan demikian, suatu fenomena hanya dapat dipahami secara utuh melalui struktur yang mendasarinya, yang bersifat relatif tetap, melampaui waktu dan individu yang terlibat.

Levi-Strauss, sejalan dengan para antropolog lainnya, mengemukakan tiga pandangan utama mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Pertama, bahasa dipahami sebagai refleksi keseluruhan kebudayaan suatu masyarakat, sehingga kajian bahasa dapat digunakan untuk membaca kebudayaan secara utuh. Kedua, bahasa diposisikan sebagai bagian dari kebudayaan, sejajar dengan unsur budaya lain seperti sistem kekerabatan dan kesenian. Ketiga, bahasa dipandang sebagai kondisi bagi kebudayaan, baik secara diakronis karena bahasa mendahului pewarisan budaya maupun secara struktural, sebab bahasa dan kebudayaan dibangun dari material simbolik yang sejenis. Pandangan ini relevan untuk merumuskan struktur penyebaran ideologi pendidikan pesantren.

Menurut Roman Jakobson, strukturalisme dibangun atas kajian terhadap fenomena yang dipahami bukan sebagai rangkaian unsur yang bekerja secara mekanis, melainkan sebagai suatu keseluruhan yang saling terkait dalam satu sistem struktural. Sejalan dengan itu, Heddy Shri Ahimsa Putra menjelaskan bahwa dalam analisis struktural terdapat dua jenis struktur, yakni struktur luar (*surface structure*) dan struktur dalam (*deep structure*). Struktur luar merujuk pada relasi antarelemen yang dapat diamati secara empiris, sedangkan struktur dalam merupakan susunan makna yang dibangun berdasarkan struktur luar, tetapi tidak selalu tampak secara langsung. Struktur dalam inilah yang berfungsi sebagai model analitis untuk memahami fenomena budaya secara lebih mendalam dan sistematis.

Anthony Giddens memaknai tindakan sosial sebagai praktik yang selalu terikat pada konteks ruang dan waktu, yang ia jelaskan melalui konsep kehadiran dan ketidakhadiran. Kehidupan sosial tidak dapat dipahami secara statis, melainkan melalui relasi dinamis antarindividu yang terus “bergerak” dalam berbagai situasi.

Tindakan manusia senantiasa mengaitkan apa yang dilakukan dengan konteks tempat tindakan itu berlangsung. Konteks tersebut berfungsi sebagai latar (*setting*) yang membedakan satu situasi sosial dengan situasi lainnya. Dalam latar inilah kualitas dan kapasitas agen dibentuk secara rutin melalui pola orientasi tindakan dan komunikasi, yakni melalui apa yang mereka kerjakan dan ucapkan dalam interaksi sehari-hari.

Giddens menegaskan bahwa kesadaran bersama terhadap latar tindakan sosial membentuk dasar dari *pengetahuan mutualistik*, yaitu kemampuan para agen untuk saling memahami makna ucapan dan tindakan satu sama lain. Pengetahuan ini memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara teratur dan dapat diprediksi. Konteks, menurut Giddens, tidak dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang sekadar memengaruhi tindakan, melainkan sebagai bagian integral dari praktik sosial itu sendiri. Tindakan dan interaksi selalu terdistribusi

dalam ruang dan waktu serta direproduksi secara berkelanjutan dalam alur waktu yang tidak dapat diulang. Proses inilah yang membentuk struktur kehidupan sosial dan bahasa.

### **Tradisi dan Kiai: Analisis Struktural terhadap Peran Sosial**

“Konsep pendidikan ideologis ala pesantren memiliki urgensi sebagai tawaran pemikiran alternatif sekaligus penyeimbang terhadap dominasi ideologi pendidikan liberal di Indonesia. Untuk meminimalkan dampak negatif ideologi, pesantren membatasi ideologi pada pengertian ideologi netral dan ideologi terbuka. Ideologi netral dipahami sebagai sistem nilai, cara berpikir, dan sikap sosial-budaya yang kualitasnya ditentukan oleh substansinya. Sementara itu, ideologi terbuka hanya menetapkan nilai-nilai dasar yang implementasinya disesuaikan dengan prinsip moral dan perkembangan masyarakat secara demokratis. Dalam praktiknya, pendidikan pesantren menekankan integrasi pengetahuan, kebajikan, serta pembinaan intelektual dan emosional santri berbasis nilai-nilai keagamaan (Daud, 2012).

Salah satu strategi penyebaran ideologi menurut Terry Eagleton adalah naturalisasi, yaitu upaya menampilkan ideologi atau kepercayaan sebagai sesuatu yang tampak alamiah dan niscaya. Dalam kerangka yang lebih luas, naturalisasi merupakan modus subordinat dari reifikasi, yakni cara ideologi bekerja dengan membekukan realitas sosial. Mengacu pada Thompson sebagaimana dikutip Takwin, konsep reifikasi berasal dari Lukács, yang menjelaskan bahwa relasi dominasi dipertahankan dengan merepresentasikan kondisi historis dan sementara seolah-olah permanen, wajar, dan tak terhindarkan, dalam kehidupan sosial modern (Eagleton, 2020).

Penyebaran ideologi pendidikan pesantren di Indonesia berlangsung secara alamiah melalui proses sejarah yang panjang, berakar pada teladan Nabi Muhammad SAW. sebagai fondasi pendidikan Islam. Ajaran tentang keutamaan menuntut ilmu diteruskan oleh para sahabat dan ulama sebagai pewaris risalah kenabian. Tradisi *al-rihlah fī thalab al-‘ilm* mencerminkan motivasi religius dan semangat pencarian intelektual-spiritual, yang dalam konteks modern dikenal sebagai *the spirit of inquiry*, sebagai basis pembentukan tradisi keilmuan pesantren.

Aktivitas *rihlah* tidak sekadar tradisi akademik, melainkan prasyarat fundamental dalam proses pencarian ilmu. George Makdisi, dengan mengutip pandangan Imam al-Haramain al-Juwainī, menegaskan bahwa tradisi keilmuan pra-modern ditandai oleh kecerdasan, kesiapan hidup sederhana, keberanian merantau, bimbingan guru, serta komitmen belajar sepanjang hayat. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang menekankan bahwa jarak geografis bukan penghalang dalam menuntut ilmu, sehingga spirit *thalab al-‘ilm* terus diwariskan lintas generasi.

Proses internalisasi nilai-nilai ideologi yang bersifat historis dalam tradisi pesantren berlangsung secara persuasif dan kultural, bukan melalui pemaksaan

atau cara-cara anarkis. Kesadaran santri dibentuk melalui materi ajar, praktik keagamaan, serta keteladanan kiai sebagai figur sentral pendidikan, sehingga ideologi pesantren diadopsi secara sukarela. Dalam sejarah pesantren abad XV–XVI di Jawa, Abdurrahman Mas’ud mencontohkan sosok Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M.) yang dipandang sebagai *spiritual father* Walisongo dan guru besar tradisi pesantren. Pengaruhnya tidak hanya di Jawa, tetapi juga menginspirasi model pendidikan Islam di luar Jawa, seperti Nahdhatul Wathan di Lombok. Relasi kiai–santri tersebut merupakan kelanjutan konsep “guru–cantrik” pra-Islam, yang menempatkan kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan diyakini memiliki otoritas spiritual serta sumber keberkahan (Wiwik Setiani, 2021).

Struktur pendidikan pesantren merupakan perangkat fundamental yang menopang ketahanan eksistensi lembaga pesantren dalam jangka panjang. Dalam perspektif Strukturalisme, analisis ideologi pendidikan pesantren menunjukkan bahwa kiai sebagai elemen utama memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan ideologi tersebut. Peran kiai tidak hanya terbatas pada proses transmisi keilmuan, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai tradisional pra-modern, seperti relasi intim antara guru dan santri yang berlandaskan sistem kepercayaan, bukan semata hubungan patron-klien. Kepemimpinan kiai diterima santri karena keyakinan terhadap konsep *barakah* yang bersumber dari doktrin keistimewaan status seorang ‘alim dan wali. Praktik simbolik seperti mencium tangan kiai dipahami komunitas pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan moral, sekaligus implementasi nilai keagamaan, bukan ekspresi feodalisme.

Keberadaan kiai sebagai media komunikasi di tengah komunitas santri memiliki peran strategis dalam proses penanaman dan reproduksi ideologi yang telah hidup dalam lingkungan pesantren. Kiai tidak hanya menyediakan ruang dan kesempatan untuk mempelajari teks-teks keagamaan klasik (kitab kuning), tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunikasi yang menjembatani berbagai lapisan masyarakat pedesaan, baik yang miskin maupun yang memiliki kekuatan ekonomi. Selain itu, kiai menjadi figur teladan bagi santri dan masyarakat. Identitas kekiaian disematkan oleh masyarakat berdasarkan kedalaman ilmu keislaman dan kewibawaan personal, bukan sebagai hasil institusi pendidikan formal. Ronald Alan Lukens-Bull menegaskan bahwa istilah “kiai” merujuk pada sosok dengan kualitas di atas rata-rata.

Kiai kerap dipersepsikan oleh kalangan perencana modern sebagai aktor yang lamban dan bersahaja dalam merespons perubahan. Namun, kehati-hatian tersebut tidak terlepas dari pengalaman historis kiai yang panjang dalam berinteraksi dengan masyarakat pedesaan dan persoalan lokal. Ketika pendidikan modern menjadi kebutuhan luas, pesantren justru menunjukkan relevansinya melalui akses pendidikan yang inklusif, terbuka bagi berbagai lapisan sosial, dan relatif bebas dari hambatan biaya maupun birokrasi. Dalam konteks ini, pesantren berpotensi menjadi mitra strategis negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi.

Relevansi kiai tidak semata terletak pada simbol atau institusi fisik pesantren, melainkan pada kemampuannya menerjemahkan nilai-nilai keagamaan secara historis dan sosiologis agar mudah dipahami masyarakat. Kiai berperan sebagai penjaga otoritas keilmuan Islam, khususnya dalam mentransmisikan ajaran al-Qur'an dan Sunnah secara berkelanjutan di lingkungan pesantren.

Dalam sejarah Jawa, kiai memiliki otoritas moral dan religius yang kuat, bahkan sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan sosial. Namun, sebagian sarjana kerap keliru memandang kiai sebagai figur pasif dan tradisional. Pandangan ini mengabaikan peran strategis kiai sebagai aktor pendidikan, sosial, dan kultural yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Sejumlah hasil penelitian telah menolak dan mengoreksi pernyataan tersebut. Snouck Hurgronje, misalnya, menegaskan bahwa pada dekade pertama abad ke-20 Islam di Indonesia tidak bersifat statis sebagaimana anggapan umum. Ia menilai telah terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam kehidupan keislaman masyarakat. Namun, perubahan itu berlangsung secara bertahap, halus, dan sering kali terjadi di wilayah terpencil, sehingga kerap luput dari perhatian para sarjana non-Muslim yang kurang cermat mengkaji dinamika Islam Indonesia.

Struktur penting yang menandai proses pengakaran ideologi dalam pendidikan pesantren adalah peran santri melalui jaringan intelektual yang mereka bangun secara kolektif. Secara historis, pesantren memiliki watak mandiri dan tahan terhadap berbagai tekanan eksternal, sehingga mendorong lahirnya jejaring kepesantrenan antarsantri. Identitas dan solidaritas sesama santri dipelihara melalui jaringan yang kuat, terutama lewat pembentukan kelompok-kelompok pengajian dan diskusi keagamaan. Pertemuan rutin yang dilakukan secara bergiliran dari satu pesantren ke pesantren lain memperkuat hubungan struktural dan memperdalam internalisasi nilai-nilai ideologi pendidikan pesantren.

Selain jaringan intelektual santri, jaringan tarekat juga menjadi afiliasi ideologis yang sangat solid. Keanggotaan tarekat dipererat oleh loyalitas murid kepada guru sufi serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kesalehan. Dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa, sufisme dan tarekat telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Keberadaan figur teladan seperti Walisongo menunjukkan bahwa jaringan tarekat tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan tradisi, otoritas keagamaan, dan kesinambungan ideologi Islam pesantren.

Bangunan jaringan sosial lain yang berfungsi mempererat ikatan guru–murid di pesantren ialah praktik adopsi simbolik santri sebagai anak atau menantu. Tradisi pernikahan ini lazim diberikan kepada santri terpilih yang diproyeksikan memperkuat kharisma dan kesinambungan pesantren di masa depan. Zamakhsyari Dhofier juga mencatat adanya pernikahan antarkeluarga pesantren. Ikatan tersebut memperkuat relasi antarpesantren karena dibangun tidak hanya atas dasar keagamaan, tetapi juga persaudaraan. Dalam kultur pesantren,

persaudaraan dipandang sebagai sumber kemajuan, kesejahteraan, dan kekuatan institusional. Praktik ini sekaligus menjadi mekanisme reproduksi otoritas, legitimasi, dan stabilitas kepemimpinan pesantren secara berkelanjutan dan lintas generasi.

Di tengah kuatnya posisi kiai, kehidupan religius santri berada dalam atmosfer yang kondusif untuk mendukung dan melegitimasi figur kiai sebagai penguasa yang saleh. Ideologi yang ditanamkan kiai meresap dalam kesadaran santri dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, serta terus direproduksi melalui jargon ajaran agama. Kitab kuning sebagai unsur struktural pesantren memiliki peran penting dalam transmisi keilmuan. Proses pembelajaran berlangsung melalui metode sorogan, yakni santri menyodorkan kitab dan berhadapan langsung dengan kiai secara bergiliran.

Kegiatan pembelajaran kitab kuning diawali dengan guru membaca teks kitab yang disodorkan oleh murid, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Pada tahap ini, murid menyimak bacaan guru secara saksama sambil mencatat bunyi lafaz dengan memberikan syakal pada kata-kata Arab dalam kitab. Selain itu, murid juga menuliskan makna atau terjemahan kosakata yang dianggap sulit pada bagian margin atau di bawah teks Arab. Setelah pembacaan selesai, murid diminta mengulang kembali bacaan tersebut, sementara guru menyimak dan mengoreksi kesalahan yang muncul. Pola pembelajaran ini mencerminkan tradisi akademik yang bersifat kritis dan dialogis antara guru dan murid. Pemberian syakal dan catatan terjemahan menunjukkan proses pemahaman gramatikal dan semantik yang reflektif, sehingga nilai-nilai dalam kitab kuning tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan keagamaan dan sosial santri.

## **Kesimpulan**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki potensi yang sangat strategis, tidak hanya dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menanamkan ideologi kepada santri sebagai elemen sentral, selain kiai, dalam ranah pendidikan pesantren. Keberadaan pesantren telah menorehkan sejarah panjang, termasuk dalam perjuangan melawan kolonialisme Portugis, Belanda, dan Jepang, yang sering dibingkai melalui justifikasi religius dan simbol-simbol spiritual seperti perang suci (misal: prang sabie di Aceh). Keunikan pesantren terletak pada kemampuan mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam sebagai satu pandangan hidup yang utuh. Semakin keras penindasan kolonial, semakin intens pula perlawanan yang dilancarkan oleh komunitas pesantren, menunjukkan bahwa ideologi pendidikan yang tertanam dalam jiwa pengikutnya sangat kuat dan melekat. Kondisi ini menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan formal, tetapi juga ruang di mana nilai-nilai ideologis Islam dibentuk, diinternalisasi, dan dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari.

Strategi penyebaran ideologi di pesantren sangat dipengaruhi oleh kepiawaian kiai dan kedalaman ilmunya, menjadikannya figur sentral bagi komunitasnya. Kiai tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan perilaku santri melalui interaksi sehari-hari, sehingga ideologi yang diajarkan menjadi sangat lekat dan menyatu dengan kehidupan civitas pesantren. Jaringan alumni dan hubungan dengan masyarakat luas semakin memperkuat penyebaran nilai-nilai ini, membuat internalisasi ideologi berjalan lancar dan merata. Selain itu, keselarasan antara kultur pesantren dengan lingkungan sosial di sekitarnya memudahkan proses objektivikasi nilai-nilai pendidikan, menjadikannya relevan dan mudah diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan dominasi otoritas kiai dalam ranah pendidikan dan sosial pesantren, setiap pesan dan ajaran ideologis dapat tertanam dengan kokoh, sehingga pesantren tetap berperan sebagai lembaga yang tidak hanya mencetak cendekiawan, tetapi juga membentuk warga yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan budaya lokal secara harmonis.

## Referensi

- Achmadi. (2010). *Sebagai Paradigma Ideologi Pendidikan Islam ( Studi Buku Ideologi Pendidikan Islam ; Paradigma Humanisme*.
- Ali. (2020). Gagasan Pendidikan Humanis Religius Abdurrahman Mas'ud Ayem Nastiti Dan Mohamad Ali. *Iseedu: Journal Of Islamic Educational Thoughts And Practices*, 4(May 2020), 81–99.
- Antonius, R., & Wattimena, A. (2018). *Pedagogi Kritis : Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Untuk Indonesia*. 28(2), 180–199. <https://doi.org/10.22146/jf.34714>
- Bahri. (2019). Menggagas Era Baru Pendidikan Islam 4 . 0 Yang Visoner. *Al-Uswah: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 89–110. <https://doi.org/10.24014/Au.V2i2.7590>
- Creswell, J. W. (2009). Design Research Kuantitatif Kualitatif. *Annaba*, 133.
- Daud, A. H. M. (2012). *Ideologi Pendidikan Pesantren Kontemporer : Pendekatan Strukturalisme*. Xxxvi(2), 342–363.
- Eagleton. (2020). *Resensi Buku Ideology : An Introduction* (Vol. 1, Issue Oktober). <https://doi.org/10.21460/Aradha.2022.23.1226>
- Fitriyah, T., Idris, H. M., Firdausah, I., Fikriyah, Z., Hizkil, A., El, A., Syahputra, A., Latifah, Z., Maulani, L. D., Faila, A., Sari, K. E., Firdaus, F. A., Hariyanto, B., Lestari, F., Musyrifa, A. D., Utami, N. W., Purwantoro, W., & Zulaikha, S. R. (2022). *No Title*.
- Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Jaya. (2023). *Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah ( Analisa Arah Perkembangan )*.
- Nuryatno, M. A. (1999). *Critical Remarks On Educational Philosophy Of Paulo Freire*. 1–16.
- Rafiq, A. (2021). *Agama, Kemanusiaan Dan Keadaban*.
- Remaja, P., & Togel, D. (2018). Strategi Komunikasi Tokoh Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Remaja Demam Togel ( Studi Kasus Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan ). *Ummul Qura*, Xi(1), 90–109.

- Soeharto, K. (2010). *Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia Tentang*. 17(April), 68–81.
- Telegraph, D. (2009). *Eighteen*. 379–407.
- Wildan Et Al. (2019). *No Title*.
- Wiwik Setiani. (2021). *Studi Ritual Keagamaan*.
- Yavuz, M. (2024). *Ideology As A Legitimation Tool For Authoritarian Regimes Quantitative Evidence From Turkey And Beyond Copyright Notice*.
- Zubaedi. (2017). *Strategi Pendidikan Karakter (Untuk Paud Dan Sekolah)*.